



## PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANTUL

### D.I. YOGYAKARTA

*Oleh*

Agus Riyadi

00/135149/GE/4786

### INTISARI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan judul “Analisis Perubahan Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap penerimaan PAD (pajak, retribusi, BUMD, dan lain-lain penerimaan yang syah) sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, untuk mengetahui perubahan terhadap jumlah penerimaan masing-masing sumber PAD dan banyaknya jenis-jenis sumber penerimaan dari sector-sektor PAD, untuk mengetahui potensi dari jenis-jenis sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan, serta untuk mengetahui efektivitas dari Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan PAD. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisa data sekunder dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data PAD Kabupaten Bantul selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu dari anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 2003.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan terhadap struktur penerimaan PAD Kabupaten Bantul. Pertama, terjadi perubahan struktur besarnya nilai penerimaan PAD, Dimana, dari tahun ketahun penerimaan PAD Kabupaten Bantul semakin meningkat. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan rata-rata 32,68 persen yaitu dari Rp.3.227.855.979; pada tahun 1994/1995 meningkat menjadi Rp.32.882.358.490; pada tahun 2003. Kemudian, yang ketiga adanya kebijakan baru dari Dipenda terhadap pengelolaan PAD, berupa pembagian tugas/wewenang dalam pemungutan PAD dan upaya peningkatan penerimaan PAD yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Perubahan struktur PAD Kabupaten Bantul, secara umum dipengaruhi oleh pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Perubahan struktur PAD yang terjadi yaitu dengan meningkatnya penerimaan PAD, adanya perubahan terhadap jumlah dan banyaknya jenis-jenis penerimaan dari masing-masing sumber PAD serta adanya kebijakan baru terhadap pengelolaan PAD (intensifikasi dan ekstensifikasi). Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan dalam menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sendiri termasuk bidang keuangannya yaitu dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah khususnya PAD memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

**Kata Kunci :** Perubahan struktur PAD, pajak, retribusi, otonomi daerah